

Dampak QR Code Cross Border Payment Terhadap Penggunaan Dolar Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara

Andini Valentina Putri¹, Muhammad Yusra², Poppy Irawan³

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: ¹andinivalentina6@gmail.com, ²muhammadyusra@soc.unand.ac.id,
³poppyirawan@soc.unand.ac.id

Abstract

QR Code Cross Border Payment is one of ASEAN's policies that aims to increase the use of local currencies. The integration of the Local Currency Transaction Framework with QR Code Cross Border Payment has a role in increasing transaction efficiency, supporting the digitalization of trade and investment, and maintaining macroeconomic stability adopted from ASEAN economic integration. The research use qualitative methodology where the data for the research is obtained from various reading resources such as scientific journals, news, and official government website. This research analyzes QR Code Cross Border Payment in two relevant dedollarization policies conceptions from IMF Working Paper written by Annamaria Kokenyne, Jeremy Ley, and Romain Veyrune. The role of the government is seen after the ratification of the QR Code Cross Border Payment policy adopted into domestic regulations have an impact on increasing the use of local currencies in each country. Increasing the use of local currencies have an impact and no longer depend on the USD. The dedollarization policy in the payment system uses a domestic payment system and no longer uses the American network payment system such as MasterCard and uses foreign currencies. QR Code Cross Border offers a cheap and low-cost payment system.

Keywords: *QR Code Cross Border Payment, ASEAN, Economic Integration, Local Currency Transactions, Dedollarization.*

PENDAHULUAN

ASEAN terus menunjukkan kiprahnya dalam membangun kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara salah satunya dengan pemanfaatan teknologi. Berbagai kerjasama dalam pemanfaatan teknologi dilakukan oleh negara-negara di regional ini untuk terus memajukan perekonomian kawasannya. Demi memajukan perekonomian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di kawasan, ASEAN mempromosikan penggunaan pembayaran digital lintas batas

secara meluas untuk semua negara di kawasan (Avirutha 2021). Salah satu agenda *ASEAN Economic Community* (AEC) untuk mewujudkan integrasi ekonomi pada pembayaran digital lintas batas adalah *ASEAN Digital Integration Framework* 2019-2025. Salah satu implementasi atau upaya ASEAN untuk pembayaran digital lintas batas adalah dengan pengadopsian sistem pembayaran berbasis *QR Code* atau yang lebih dikenal dengan *QR Code Cross Border Payment* (ASEAN 2019).

Berbeda dengan menggunakan kartu kredit dan debit yang terjaring dalam jaringan Amerika, seperti penggunaan kartu debit dan kredit *MasterCard* setiap transaksi yang dilakukan di luar mata uang dolar Amerika Serikat (USD) akan di konveriskan ke dalam mata uang USD terlebih dahulu (Adelstein and Randi 2012). Pada penggunaan kartu kredit dan debit seperti *MasterCard* akan dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah transaksi (Vantage 2019). Namun, dengan *QR Code Cross Border Payment* transaksi akan langsung di konversikan ke mata uang lokal negara tujuan. Integrasi pengembangan *Local Currency Settlement Framework* (LCS) dengan *QR Code Cross Border Payment* memiliki peranan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, dan menjaga stabilitas makroekonomi (Abdurahman et al. 2022).

Pada KTT ke-42 ASEAN adanya agenda ASEAN pada peningkatan kerangka kerjasama *Local Currency Transaction Framework* (LCT) dan *Regional Payment Connectivity* (RPC) digitalisasi ekonomi dalam rangka menciptakan integrasi ekonomi, penguatan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa sektor keuangan yang inklusif dan stabil yang dicanangkan pada *ASEAN Economic Community* (ASEAN 2023a). *QR Code Cross Border Payment* berbasis mata uang lokal diharapkan dapat mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih transparan, dan lebih inklusif (ASEAN 2023b). Penyelesaian transaksi menggunakan *QR Code Cross Border Payment* membawa keuntungan,

kemampuannya untuk melindungi negara-negara anggota ASEAN dari fluktuasi nilai tukar dolar Amerika (USD) (KADIN 2023). Tercatat pada awal penerapan *QR Code Cross Border Payment* antara Indonesia (QRIS) dan Thailand (Thai QR Payment) pada tahun 2022 hingga bulan Juli 2023, transaksi wisatawan Indonesia di Thailand dengan kode QR Thailand mencapai 14. Sedangkan jumlah transaksi wisatawan Thailand di Indonesia dengan QRIS sebanyak 492 transaksi. Pada tahun 2022 hingga Januari 2024 penggunaan *QR Code Cross Border Payment* antara wisatawan Malaysia di Indonesia ada 73.300, transaksi wisatawan Indonesia di Malaysia ada 11.533 transaksi dengan nominal Rp2,9 miliar (ASEAN 2023).

Penggunaan *QR Code Cross Border Payment* berbasis mata uang lokal dapat mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih transparan, dan lebih inklusif. Adanya *QR Code Cross Border Payment* membawa keuntungan bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Populernya pengadopsian sistem pembayaran digital *QR Code Cross Border Payment* berhasil membuat penggunaan mata uang lokal meningkat. Peningkatan mata uang lokal tentu saja membantu mengurangi intensitas penggunaan mata uang asing terutama USD. Penggunaan USD sebagai mata uang perdagangan internasional yang sering dijadikan mata uang perantara dalam bertransaksi akan memudar seiring berkembangnya pembayaran digital dalam kawasan Asia Tenggara. Perlu untuk memahami dampak *QR Code Cross Border Payment* terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat (USD) di kawasan Asia Tenggara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (Creswell and Creswell 2018). Penelitian kualitatif deskriptif dimana penulis akan menggambarkan bagaimana *QR Code Cross Border Payment* ini akan memberikan dampak pada penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat.

Penelitian ini dibatasi oleh penulis pada rentang tahun 2022 hingga penelitian ini berlangsung. Tahun 2022 merupakan saat *QR Code Cross Border Payment* pertamakali digunakan dan hingga hari ini *QR Code Cross Border Payment* masih melakukan perluasan pengadopsian di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini akan menggambarkan tentang dampak *QR Code Cross Border Payment* terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa jurnal ilmiah, surat kabar, dan sumber sekunder lainnya. Selain itu data primer juga digunakan sebagai sumber penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber seperti dokumen publik situs resmi, pernyataan pers, lembar kerjasama, surat kabar, pernyataan pers dan lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini terdapat salah satu tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul *Emerging Economics, Emergent Currencies: A look into Dedollarization in Southeast Asia*. Pada *journal of modern economy* yang ditulis oleh Rohan Kumar Agarwal. Tinjauan pustakan ini membahas tentang potensi dedolarisasi di Asia Tenggara dengan melihat mata uang dalam beberapa dekade terakhir. Bangkitnya perekonomian paska perang dunia kedua banyak negara harus beradaptasi dengan tatanan perekonomian global yang didominasi oleh dolar. Amerika Serikat yang mempunyai pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia memainkan peran penting dalam pasar global, dimana dolar mendominasi perdagangan lintas batas. Ketika ketegangan geopolitik meningkat, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai melihat potensi dari diversifikasi eksposur mata uang mereka dan meminimalkan kerentanan terhadap guncangan finansial dan sanksi ekonomi. Jurnal ini membahas lanskap dolarisasi negara-negara ASEAN dan mengkaji upaya masing-masing kawasan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS. Jurnal ini memberikan penulisan Gambaran baru untuk melihat upaya-upaya negara-negara di ASEAN

untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dengan *Local Currency Transaction* (Agarwal 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Operasi Pemerintah dalam Mata Uang Lokal dengan Kebijakan QR Code Cross Border Payment

Operasi pemerintah dalam mata uang lokal adalah kondisi dimana pemerintah harus mengambil peran dalam operasi penggunaan mata uang lokal. Penggunaan mata uang lokal dalam operasional pemerintah dapat diatur dalam kebijakan dan peraturan khusus yang dapat menjamin stabilitas keuangan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal (Annamaria, Jeremy, and Romain 2010).

Di kawasan Asia Tenggara di bawah organisasi ASEAN, pemerintah masing-masing negara anggota berkolaborasi dalam operasi penggunaan mata uang lokal. Operasi penggunaan mata uang lokal oleh di kawasan Asia Tenggara ini dapat kita dilihat dari tujuan integrasi ekonomi yang tertuang dalam ASEAN Economic Community Blueprint, peranan masing-masing bank sentral ASEAN, KTT ASEAN yang membahas *Local Currency Transaction*, dan MoU yang telah disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Peranan pemerintah dalam mata uang lokal juga dapat dilihat dari komitmen-komitmen yang disampaikan langsung oleh ketua ASEAN, pemimpin negara, dan para pemimpin bank-bank sentral di ASEAN.

ASEAN Economic Community Blueprint merupakan salah satu bentuk upaya ASEAN dalam penggunaan mata uang lokal. Integrasi ekonomi dapat memudahkan negara-negara anggota ASEAN untuk mengadopsi kebijakan seperti penerapan *Local Currency Transaction* dan *QR Code Cross Border Payment* sebagai bentuk memperkuat kerjasama. *Local Currency Transaction* yang pada awal

pembentukannya bernama *Local Currency Settlement* yang pada awalnya di terapkan di 3 negara Indonesia, Malaysia, Thailand kini sudah diperluas ke berbagai negara-negara ASEAN. Peranan bank sentral masing-masing negara paling besar dalam kerjasama ini. Kemudian, ASEAN melihat perlu adanya pengintegrasian antara LCT dengan *QR Code Cross Border Payment* sebagai langkah pemerintah untuk perluasan penggunaan mata uang lokal agar tidak bergantung pada satu mata uang.

Kebijakan *QR Code Cross Border Payment* membawa banyak keuntungan. Salah satu keuntungan utama sistem pembayaran regional ini adalah kemampuannya untuk melindungi negara-negara anggota ASEAN dari fluktuasi nilai tukar. Karena transaksi dilakukan dalam mata uang lokal, penyelesaiannya tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar dolar AS. Selain itu, inisiatif ini memiliki potensi transformatif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memungkinkan mereka mengakses pasar di luar negara asal mereka. Kebijakan ini dapat mendorong kawasan ASEAN menuju masa depan untuk transaksi yang lancar dan cepat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan integrasi keuangan melalui digitalisasi ekosistem keuangan. Dalam penerapan *QR Code Cross Border Payment* sudah 9 negara menandatangani MoU dan 2 negara lainnya yaitu Myanmar dan Timor Leste masih menjadi pengamat. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya teknologi dan kesiapan masing-masing negara dalam penerapannya.

Operasi pemerintah dalam mata uang lokal juga terlihat pada pertemuan menteri-menteri keuangan negara-negara anggota ASEAN Maret 2023 di Bali. Para menteri keuangan menegaskan komitmen negara-negara untuk perluasan kerjasama terutama penggunaan mata uang lokal setelah Presidensi G20 Indonesia, 5 bank sentral ASEAN (Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina) telah menandatangani MOU mengenai interkoneksi dan interoperabilitas lintas batas, penggunaan QR, pembayaran cepat dan LCT (AFMGM 2023).

Pada KTT ASEAN ke 42 di Labuan Bajo, Indonesia, anggota ASEAN menandatangani kesepakatan untuk mendorong konektivitas pembayaran regional (RPC) dan penggunaan transaksi dalam mata uang lokal (LCT). Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk beralih dari mata uang yang sudah mapan yang sering digunakan untuk transaksi keuangan dan perdagangan seperti dolar Amerika Serikat. ASEAN mendeklarasikan inisiatif untuk menjajaki keterkaitan transaksi mata uang lokal ASEAN dengan inisiatif pembayaran lintas batas termasuk konektivitas pembayaran (RPC) yaitu *QR Code Cross Border Payment* (ASEAN 2023a).

Peranan pemerintah dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan gubernur bank sentral salah satunya gubernur bank sentral Indonesia, Perry Warjiyo. Beliau mengatakan “ASEAN terus mengumukan inisiatif-inisiatif strategis lainnya untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi bilateral melalui kerangka kerjasama LCT, yang diharapkan dapat diimplementasikan secara penuh pada tahun 2024”. Kemudian, Perry Warjiyo juga menyampaikan melalui implementasi LCT, inisiatif interkoneksi pembayaran QR antar negara nantinya akan menggunakan korelasi langsung nilai tukar mata uang yang nantinya akan disediakan oleh bank *Appointed Cross Currency Dealers* di setiap negara. Perry Warjiyo juga mengatakan “implementasi QR lintas batas yang di dasari dengan LCT sebagai bentuk diversifikasi mata uang, sehingga kawasan tidak lagi bergantung pada mata uang dolar”. Hal ini disampaikan Perry Warjiyo pada saat perilisan QR lintas batas antara Indonesia dan Singapura (Monetary Authority of Singapore 2023).

Setelah adanya kesepakatan di kawasan penggunaan *QR Code Cross Border Payment* di adopsi ke jaringan pembayaran di masing-masing negara ASEAN. Indonesia melalui Bank Indonesia adalah sebagai penginisiasi *QR Code Cross Border Payment* di kawasan Asia Tenggara. Melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) memegang peranan penting dalam menghubungkan berbagai transaksi digital ke dalam satu sistem pembayaran yang terintegrasi. Salah satu bentuk

kemajuan sistem pembayaran berbasis GPN adalah *QR Code Cross Border Payment* QRIS Indonesia bekerja sama dengan berbagai perusahaan penyedia jasa pembayaran dari berbagai negara di kawasan ASEAN seperti NETS dari Singapura, ITMX dari Thailand, dan Paynet dari Malaysia (Jaringan Prima 2024).

Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI mengadopsi standar pembayaran lintas operasi global EMVCO (Europay, MasterCard, dan Visa). Hal ini akan memungkinkan penerapan layanan QRIS lintas batas pada tahun 2021. Standar EMVCo bersifat *open source* dan dapat dioperasikan dengan beragam penyedia layanan keuangan, sehingga memfasilitasi interoperabilitas antar pemangku kepentingan, instrumen, dan negara (Rachmad and Raharjo 2023). Berdasarkan *ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting* (AFMGM) pada Agustus 2023, saat ini dalam pengadopsian kebijakan *QR Code Cross Border Payment* melalui pembayaran menggunakan kode QR masih di wadahi oleh masing-masing bank sentral. AFMGM menyambut perluasan hubungan pembayaran melalui kode QR lintas batas bilateral di ASEAN (AFMGM 2024).

Setelah adanya perjanjian kerjasama, kebijakan *QR Code Cross Border Payment* di adopsi ke berbagai jaringan pembayaran lokal negara-negara anggota ASEAN. Bank-bank sentral masing-masing negara memiliki peranan yang sangat penting untuk pengadopsian *QR Code Cross Border Payment* yang berbasis mata uang lokal. ASEAN terus mengupayakan untuk mengkonsolidasikan sistem bilateral ini ke dalam kerangka multilateral terpadu. Proyek Nexus, yang di prakasai oleh Bank for International Settlement (BIS) adalah Langkah pertama ASEAN untuk mewujudkan visi QR di seluruh ASEAN. Proyek ini akan menggantikan mekanisme bilateral regional menjadi kerangka kerja yang dapat dioperasikan bersama yang menampilkan *platform* untuk mengelola pembayaran lintas batas di ASEAN. Proyek Nexus ini akan diupayakan beroperasi secara penuh pada tahun 2025 (Kristina 2023). Operasi pemerintah dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat dapat kita lihat dari peran ASEAN dan peran-peran

bank sentral negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan kebijakan *QR Code Cross Border Payment*. Dalam implementasi kebijakan ini adanya sistem pembayaran lintas batas menggunakan kode QR yang memastikan dalam setiap transaksinya menggunakan mata uang lokal masing-masing negara dan tidak lagi menggunakan mata uang asing (dolar AS) sebagai mata uang perantara. Dengan adanya kebijakan *QR Code Cross Border Payment* juga mewujudkan integrasi ekonomi di Kawasan ASEAN yang menciptakan kemandirian kawasan sehingga tidak lagi terpengaruh dan bergantung pada satu poros kekuatan besar seperti Amerika Serikat.

Sistem Pembayaran dengan Menggunakan Kebijakan QR Code Cross Border Payment

Sistem pembayaran domestik harus memastikan mata uang lokal pembayaran dengan persyaratan yang setidaknya sama menguntungkannya dengan mata uang asing dalam pembayaran. Bank sentral harus menawarkan layanan pembayaran yang nyaman dan berbiaya rendah untuk pembayaran dalam mata uang domestik dan tidak mendukung pembayaran dalam mata uang asing (Annamaria, Jeremy, and Romain 2010).

Untuk kawasan Asia Tenggara, ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang, mengeluarkan kebijakan *QR Code Cross Border Payment* sebagai sistem pembayaran menggunakan kode QR. Pembayaran dengan kode QR menjadi salah satu metode pembayaran digital di Asia Tenggara. Standarisasi sistem pembayaran digital di tingkat nasional merupakan langkah pertama yang penting menuju pembangunan sistem pembayaran kode QR lintas batas, dimana bank sentral di negara-negara peserta sudah menunjukkan penerimaan terhadap sistem pembayaran yang terhubung.

Sistem pembayaran lintas batas ASEAN, dengan penekanan pada transaksi yang aman, efisien, dan inklusif, siap untuk membentuk kembali lanskap keuangan di Asia Tenggara. Dengan memungkinkan pembayaran tanpa batas dalam mata

uang lokal, inisiatif ini mendorong integrasi ekonomi yang lebih besar bagi ASEAN dan memperkuat posisi kawasan ini di pasar global. Melalui sistem transaksi kode QR, wisatawan ASEAN dapat dengan mudah melakukan pembelian di negara anggota lainnya tanpa khawatir terhadap konversi mata uang atau fluktuasi nilai tukar. Inisiatif ini juga akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan di ASEAN secara keseluruhan.

Kode QR membuat pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan sederhana dan lancar tanpa memerlukan uang tunai, kartu, dan tanda tangan. Hanya dengan mengarahkan kamera *smartphone* yang kita miliki ke kode QR yang ditampilkan kita dapat melakukan dan menerima pembayaran. Solusi pembayaran yang sederhana ini telah merevolusi ruang pembayaran digital dan mengubah cara pandang kita terhadap pembayaran global. Popularitas pembayaran kode QR di Asia Tenggara juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan dukungan pemerintah. Pemerintah dan regulator di Asia Tenggara telah mengambil pendekatan proaktif dalam mendorong ekosistem pembayaran digital, sehingga membentuk evolusi pembayaran dengan kode QR.

Pengadopsian *QR Code Cross Border Payment* terluas meluas pengadopsiannya ke berbagai negara di Asia Tenggara ditandai dengan menyusulnya penandatanganan *MoU Regional Payment Connectivity* oleh beberapa negara. Pada tahun 2023 Singapura, Kamboja, Vietnam, Brunei Darusalam, dan Laos mulai uji coba penggunaan QR Code Payment berbasis mata uang lokal. Sementara itu, Myanmar dan Timur Leste Masih menjadi pengamat untuk pengimplementasian *QR Code Cross Border Payment* ini.

QR Code Cross Border Payment berbasis penggunaan mata uang lokal (LCT) untuk bertransaksi lintas batas dengan biaya rendah atau dihilangkan, umumnya menggunakan nilai konversi mata uang yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan sistem pembayaran kartu kredit/debit besar yang berada di bawah jaringan Amerika. Berbeda dengan kartu yang berada di bawah jaringan Amerika

seperti *MasterCard*, setiap transaksi yang dilakukan di luar mata uang dolar USD akan di konveriskan ke dalam mata uang dolar USD terlebih dahulu (Adelstein and Randi 2012). *MasterCard* mengenakan biaya penilaian pelanggannya untuk berbagai layanan yang diberikannya kepada pelanggannya, termasuk penggunaan merek *MasterCard* secara global.

Biaya penilaian ini biasanya berupa persentase biaya dari total volume transaksi pelanggan yang dilakukan pada kartu bermerek *MasterCard*. Karena kehadiran global *MasterCard*, transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing dikonversi ke Dolar AS dan biaya persentase (yaitu biaya penilaian) dihitung berdasarkan volume Dolar AS yang dikonversi. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing berdampak pada jumlah pendapatan penilaian Dolar AS yang dikumpulkan *MasterCard*. Pada penggunaan kartu kredit dan debit seperti *MasterCard* akan dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah transaksi dan untuk pengkonverisan transaksi jika transaksi dilakukan dalam mata uang selain dolar akan dikenakan biaya konversi transaksi sebesar 0,20% dari jumlah transaksi yang dilakukan (Vantage 2019).

Dengan adanya pengadopsian *QR Code Cross Border Payment* sebagai sistem pembayaran, setiap transaksi menggunakan *QR Code Cross Border Payment* pelanggan tidak dikenakan biaya transaksi setiap transaksi dengan memindai kode QR pembayaran yang ada di setiap negara. Seperti yang disampaikan oleh wakil presiden senior *digital banking* Bank Mandiri Sunarto Xie mengatakan bahwa sebagai pelaku industri, Bank Mandiri melihat nilai ekonomis dalam penerapan *QR Code Cross Border Payment*. Bank Mandiri memperkirakan bahwa biaya transaksi menggunakan kode QR lebih murah 30% dibandingkan menggunakan pembayar kartu debit dan kredit *MasterCard* dan *Visa* yang berada di bawah jaringan Amerika Serikat (Wuryasti 2022).

Sebagai salah satu contoh penurunan penggunaan kartu kredit dan debit yang berada dalam jaringan Amerika Serikat adalah Indonesia yang juga mendopsi QR

Code Cross Border Payment. Dalam pengadopsian pembayaran dengan menggunakan kode QR di Indonesia atau QRIS yang merupakan bagian dari Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Indonesia, Indonesia melalui jaringan pembayaran nasional, GPN meminimalisir peran Visa MasterCard untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat. Langkah Indonesia ini merupakan bagian dari tren regional yang lebih luas, dengan berbagai negara dan wilayah untuk mendorong kontrol yang lebih besar dalam sistem pembayaran. Pada pertemuan puncak G20 tahun 2022 di Bali, Bank Sentral 5 negara anggota ASEAN sepakat menanda tangani nota kesepahaman untuk mengintegrasikan sistem pembayaran mereka ke dalam jaringan pembayaran regional untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran Amerika Serikat, sekaligus untuk memotong biaya transaksi karena transaksi dapat dilakukan dalam mata uang lokal tanpa harus menggunakan mata uang asing.

QR Code Cross Border Payment yang terintegrasi dengan Transaksi mata uang lokal atau *Local Currency Transaction* sebagai kerangka kerjasama integrasi ekonomi kawasan. *Local Currency Transaction Framework* merupakan turunan dari *Local Currency Settlement Framework* (LCSF). *Local Currency Settlement Framework* adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan dalam mata uang lokal masing-masing negara dimana penyelesaian transaksinya dilakukan di dalam wilayah masing-masing negara. LCSF di imlementasikan dengan adanya *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) yang merupakan bang yang ditunjuk negara untuk memfasilitasi pelaksanaan LCSF (Bank Indonesia 2017).

Local Currency Settlement Framework pada awal pembentukannya di prakarsai oleh 3 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Melalui bank sentral masing-masing negara menandatangani kesepakatan kerjasama pada tanggal 11 Desember 2017. Kerangka kerja LCS memastikan setiap transaksi antar negara ASEAN dapat dilakukan dalam mata uang lokal memungkinkan transaksi antar lintas batas negara kawasan tidak lagi bergantung pada satu mata

uang utama yaitu dolar Amerika Serikat. LCSF akan berpengaruh pada efisiensi pasar di ASEAN dan akan berpengaruh pada pengembangan pasar mata uang lokal di masing-masing negara anggota ASEAN (Fernando and Turnip 2024).

Pada KTT ke-42 ASEAN agenda *Local Currency Settlement Framework* berkembang dengan penambahan kerangka kerjasama *Local Currency Transaction Framework* (LCT) dan *Regional Payment Connectivity* (RPC) digitalisasi ekonomi dalam rangka menciptakan integrasi ekonomi, penguatan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa sektor keuangan yang inklusif dan stabil yang dicanangkan pada *ASEAN Economic Community*. Penggunaan mata uang lokal atau *Local Currency Transaction Framework* (LCT) dalam transaksi lintas batas di Asia Tenggara sangat relevan untuk kita dorong saat ini. Menjaga stabilitas nilai tukar sangat krusial untuk mendukung penguatan ekonomi nasional. Seruan ini kembali bergema dari pertemuan kepala negara anggota ASEAN di KTT ke-42 di Labuan Bajo pada tahun 2023. Deklarasi para pemimpin ASEAN dari KTT ke-42 Labuan Bajo yakni terkait upaya mempercepat konektivitas sistem pembayaran regional dan promosi transaksi menggunakan mata uang lokal atau *Local Currency Transaction Framework* (LCT).

Berdasarkan data dari Bank Indonesia tercatat pada awal penerapan *QR Code Cross Border Payment* antara Indonesia (QRIS) dan Thailand (Thai QR Payment) pada tahun 2022 hingga bulan Juli 2023, transaksi wisatawan Indonesia di Thailand yang menggunakan kode QR Thailand mencapai 14.555 transaksi dengan nilai Rp 8,54 miliar. Sedangkan jumlah transaksi wisatawan Thailand di Indonesia dengan QRIS sebanyak 492 transaksi dengan nilai Rp114 juta. Pada tahun 2022 hingga Januari 2024 penggunaan *QR Code Cross Border Payment* antara wisatawan Malaysia di Indonesia ada 73.300 dengan nominal Rp20 miliar, transaksi wisatawan Indonesia di Malaysia ada 11.533 transaksi dengan nominal Rp2,9 miliar (ASEAN 2023b) .Pengadopsian *QR Code Cross Border Payment* berbasis mata uang lokal diharapkan dapat mewujudkan

pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih transparan, dan lebih inklusif. Nilai tukar mata uang asing (FX) yang lebih kompetitif dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penarikan kredit atau ATM. Tautan pembayaran QR lintas batas diaktifkan dengan Transaksi Mata Uang Lokal (LCT). LCT dapat meningkatkan ketahanan eksternal dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang utama seperti dolar Amerika Serikat. LCT juga menggunakan kuotasi langsung untuk memberikan nilai tukar yang lebih kompetitif dan transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan efisien. Transaksi yang menggunakan tautan pembayaran QR lintas negara tidak akan terlalu terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. *QR Code Cross Border Payment* lebih aman digunakan karena kita tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar dan tidak ada risiko kloning kartu, penggesekan ganda, dan sistem pembayaran menggunakan QR memitigasi risiko global. *QR Code Cross Border Payment* juga memastikan sistem pembayarannya yang tidak lagi melibatkan mata uang asing (USD) dalam pengkonverisannya.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini di temukan hasil dan kesimpulan bahwa *QR Code Cross Border Payment* menjadi salah satu cara ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar dan menghindari resiko-resiko ekonomi global yang diberikan oleh Amerika Serikat. Pemerintah mengambil peranan yang sangat besar dalam pengoperasian penggunaan mata uang lokal melalui pengadopsian *QR Code Cross Border Payment*. Operasi pemerintah dalam mata uang lokal juga terlihat pada kebijakan yang di keluarkan ASEAN yaitu *QR Code Cross Border Payment* dan berbagai kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh bank-bank sentral. Bank sentral memastikan pengadopsian penggunaan QR pembayaran lintas batas yang di adopsi ke jaringan pembayaran masing-masing negara. Sistem pembayaran yang murah, aman, nyaman memberikan keuntungan, dan tidak melibatkan mata uang asing dalam pembayaran. *QR Code Cross Border Payment* kebijakan untuk sistem pembayaran yang menawarkan

keuntungan, kemudahan, dan kenyamanan bagi penggunanya sehingga tidak perlu lagi menggunakan sistem pembayaran yang berada dibawah jaringan Amerika Serikat. Seiring dengan berjalannya waktu, pengadopsian *QR Code Cross Border Payment* berbasis penggunaan mata uang lokal dapat meningkatkan penggunaan mata uang lokal sehingga tidak lagi bergantung pada satu mata uang yaitu dolar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Bayu Purwoko Agung, Suci Marlina Alen, Puspa Hapsari Angga, Erlin N.S Astrika, Andrianty Gilang, Nurmalia Ina, et al. 2022. "Laporan Perekonomian Indonesia 2022." https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2022.aspx.
- Adelstein, and D. Randi. 2012. "Margin and Capital Requirements for Covered Swap Entities."
- Agarwal, Rohan Kumar. 2023. "Emerging Economics, Emergent Currencies: A Look into Dedollarization in Southeast Asia." *Journal of Modern Economy* 14: 1432–38. doi:10.4236/me.2023.1410074.
- Avirutha, Anupong. 2021. "ASEAN in Digital Economy: Opportunities and Challenges." *Journal of ASEAN PLUS+* Vol. 2: 17–24. <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus/article/view/245334>.
- Bank Indonesia. 2017. "Q&A Local Currency Settlement (LCS) & Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)." *Bank Indonesia*. <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01093/en-us>.
- . 2023b. "QRIS Menyederhanakan Pembayaran Di Negara-Negara ASEAN." *ASEAN Indonesia 2023*. <https://asean2023.id/en/news/qr-simplifies-payments-in-asean-countries>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition, Fifth Edit*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Fernando, Jason, and Ezra Yora Turnip. 2024. "Peluang Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 Dalam Mempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement Dan QR Code Lintas Batas Terkait Transaksi Perdagangan Di Asia Tenggara." *Jurnal Sentris* 4 (2): 114–34. doi:10.26593/sentris.v4i2.7124.114-134.
- Jaringan Prima. 2024. "Mengenal Apa Itu QRIS, PromptPay, SGQR, Dan

DuitNow.” <https://www.jaringanprima.co.id/id/mengenal-apa-itu-qr-promptpay-sgqr-dan-duitnow>.

KADIN. 2023. “The Increasingly Evident Progress of ASEAN QR Code Financial Integration, Arsjad Rasjid: QR Codes of Thailand and Cambodia Have Been Connected.” <https://kadin.id/wp-content/uploads/20230620-ASEAN-QR-Code-Eng-Copy-.pdf>.

Kristina, Fong Siew Leng. 2023. “Connecting The Dots: Towards an ASEAN QR Code Payments Network.” *Fulcrum*. <https://fulcrum.sg/aseanfocus/connecting-the-dots-towards-an-asean-qr-code-payments-network/>.

Monetary Authority of Singapore. 2023. “Launch of Cross-Border QR Payments Linkage between Indonesia and Singapore.” [https://www.sgpc.gov.sg/api/file/getfile/Launch of Cross-border QR Payments Linkage between Indonesia and Singapore_17 November 2023.pdf?path=/sgpcmedia/media_releases/mas/press_release/P-20231117-3/attachment/Launch of Cross-border QR Payments Linkage](https://www.sgpc.gov.sg/api/file/getfile/Launch_of_Cross-border_QR_Payments_Linkage_between_Indonesia_and_Singapore_17_November_2023.pdf?path=/sgpcmedia/media_releases/mas/press_release/P-20231117-3/attachment/Launch_of_Cross-border_QR_Payments_Linkage) be.

Wuryasti, Fetry. 2022. “QR Code Cross Border Bisa Bikin Biaya Transaksi Lebih Murah 30%.” *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/JKR3Gr3N-qr-code-cross-border-bisa-bikin-biaya-transaksi-lebih-murah-30>.